Jaringan Sosial Dalam Isu Transparansi dan Partisipasi Publik pada Pilkada Jawa Timur 2024

M. Alexander Mujiburrohman[1*], Novy Setia Yunas[2], Fauzi[3], dan Muhtar Haboddin[4]
[1*,2,3,4] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : malexanderm@ub.ac.id

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3827 - 3835

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4027

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4027

Article History:

Received: 18-08-2026
Revised: 13-10-2026
Accepted: 16-10-2026

Abstract *: The development of social media has transformed patterns of political communication and public participation in democratic processes. The increasing intensity of public interactions in digital spaces has made transparency in election administration and public participation increasingly important issues to analyzed. This study aims to mapping the social network structure surrounding transparency and public participation in the 2024 East Java Regional Election and identify influential actors and relationship patterns among actors in digital communication. This study employed a quantitative approach using Social Network Analysis (SNA). Data were collected from public interactions on X and Facebook containing keywords related to election transparency, public participation, the East Java General Elections Commission (KPU), and election oversight. The data were analyzed using Gephi software by measuring degree centrality, betweenness centrality, and modularity. The results revealed four main clusters in the conversation network, dominated by local media accounts, the East Java KPU, and political influencers. The East Java KPU served as a bridge connecting conversation clusters, while local media played a prominent role in information dissemination. These findings indicate that social media serves as an important arena for information dissemination, public oversight, and the formation of digital political participation in the 2024 East Java Regional Election. Strengthening participatory and inclusive digital communication is essential to supporting transparency and improving the quality of local democracy.*

Keywords *: social network analysis; electoral transparency; public participation; 2024 East Java election; social media*

Abstrak : Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Tingginya intensitas interaksi publik di ruang digital menjadikan isu transparansi penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat semakin penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan memetakan struktur jaringan sosial dalam isu transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024 serta mengidentifikasi aktor yang berpengaruh dan pola hubungan antaraktor dalam percakapan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Social Network Analysis (SNA)*. Data diperoleh dari interaksi publik pada platform X dan Facebook yang memuat kata kunci terkait transparansi pemilu, partisipasi publik, KPU Jawa Timur, dan pengawasan pemilu. Analisis menggunakan perangkat lunak Gephi melalui pengukuran *degree centrality, betweenness centrality*, dan *modularity*. Hasil menunjukkan bahwa jaringan percakapan membentuk empat klaster utama yang didominasi oleh akun media lokal, KPU Jawa Timur, dan influencer politik. KPU Jawa Timur sebagai penghubung antarklaster percakapan, sedangkan media lokal menjadi aktor dalam distribusi informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena penting dalam penyebaran informasi, pengawasan publik, dan pembentukan partisipasi politik digital pada Pilkada Jawa Timur 2024. Penguatan komunikasi digital yang partisipatif dan inklusif penting untuk mendukung transparansi dan kualitas demokrasi lokal.

Kata Kunci : social network analysis; transparansi pemilu; partisipasi publik; Pilkada Jawa Timur 2024; media sosial

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola komunikasi politik dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia (Ramdani et al., 2026). Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga menjadi ruang publik untuk menyampaikan opini, mengawasi kebijakan, dan membangun partisipasi politik warga negara (Nasir, 2026). Platform digital memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara cepat, berdiskusi mengenai kandidat, serta menilai kinerja penyelenggara pemilu dalam konteks pemilihan kepala daerah (Hamsi et al., 2025; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020). Pilkada Jawa Timur 2024 menjadi momentum penting karena berlangsung dalam situasi masyarakat yang semakin terhubung melalui media sosial dan teknologi digital (Syah et al., 2026). Kondisi tersebut menempatkan ruang digital sebagai arena strategis dalam pembentukan persepsi publik mengenai transparansi dan partisipasi politik (Prasetiyo & Anggreni, 2026).

Peningkatan penggunaan media sosial dalam kontestasi politik membawa peluang sekaligus tantangan bagi kualitas demokrasi lokal (Khatimah et al., 2024). Media sosial dapat memperluas akses informasi, mempercepat penyebaran berita pemilu, dan membuka ruang partisipasi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat dalam diskusi politik (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020). Di sisi lain, tingginya arus informasi juga berpotensi menimbulkan disinformasi, polarisasi politik, manipulasi opini, dan dominasi aktor tertentu dalam pembentukan wacana publik (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020). Permasalahan tersebut menjadi semakin penting ketika isu transparansi penyelenggaraan pemilu dan partisipasi masyarakat diperdebatkan secara intensif di ruang digital (Hasanah et al., 2026). Perlu pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana jaringan sosial terbentuk dan bagaimana informasi terkait transparansi serta partisipasi publik disebarkan selama tahapan Pilkada Jawa Timur 2024.

Secara empiris, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dan memiliki tingkat aktivitas politik digital yang tinggi (Ayunda et al., 2025). Besarnya jumlah pemilih, keragaman sosial, serta intensitas penggunaan media sosial menjadikan Pilkada Jawa Timur 2024 sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji dinamika komunikasi politik digital. Interaksi publik melalui platform seperti X dan Facebook memperlihatkan adanya pertukaran informasi, dukungan politik, kritik terhadap penyelenggara, serta ajakan partisipasi dalam proses pemilu (Khamdan et al., 2025). Namun, pola hubungan antaraktor, posisi aktor yang paling berpengaruh, dan pembentukan klaster percakapan belum banyak dipetakan secara sistematis. Keterbatasan tersebut menyebabkan pemahaman mengenai struktur jaringan sosial dalam isu transparansi dan partisipasi publik masih belum optimal (Aka, 2025; Isa & Himelboim, 2018; Kapoor et al., 2018).

Kajian teoritis mengenai masyarakat jaringan memberikan dasar konseptual untuk memahami fenomena tersebut. Castells menjelaskan bahwa kekuasaan dalam era digital semakin ditentukan oleh kemampuan aktor membangun dan mengendalikan arus informasi dalam jaringan komunikasi (Lupac, 2018). Dalam perspektif digital-era governance, teknologi informasi juga dipandang sebagai instrumen yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan warga negara dalam pemerintahan (Madina, 2025). Selain itu, teori partisipasi politik

menekankan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya terjadi melalui mekanisme formal seperti pemungutan suara, tetapi juga melalui diskusi publik, pengawasan, dan ekspresi politik di ruang digital (Katili et al., 2025). Media sosial dapat dipahami sebagai arena yang mempertemukan dimensi transparansi, partisipasi publik, dan distribusi kekuasaan informasi dalam proses demokrasi local (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai media sosial dan pemilu di Indonesia umumnya berfokus pada kampanye politik, perilaku pemilih, atau penyebaran informasi politik, sedangkan kajian yang secara khusus memetakan jaringan sosial dalam isu transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024 masih terbatas (Fahruji & Fahrudin, 2023). Padahal, pemetaan jaringan sosial penting untuk mengidentifikasi aktor sentral, pola hubungan antaraktor, serta posisi penghubung yang memengaruhi distribusi informasi dalam ruang digital (Antyaputri et al., 2025; Faustyna & Younus, 2026). Analisis semacam ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana wacana transparansi dan partisipasi publik dibentuk, dipertukarkan, dan diperkuat melalui interaksi daring. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *Social Network Analysis* untuk memetakan struktur jaringan sosial dalam isu transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi aktor, menganalisis pola hubungan dalam jaringan digital, serta menjelaskan bagaimana struktur jaringan tersebut memengaruhi dinamika transparansi dan partisipasi publik dalam proses Pilkada Jawa Timur 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Social Network Analysis* (SNA) untuk memetakan struktur jaringan sosial dalam isu transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024 (Santoso & Veliyanti, 2021). Rancangan penelitian bersifat deskriptif-eksploratif karena bertujuan menggambarkan pola hubungan antaraktor, posisi aktor yang berpengaruh, serta pembentukan klaster percakapan dalam ruang digital (Stieglitz et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan hubungan antaraktor secara sistematis melalui analisis jaringan komunikasi yang terbentuk di media sosial. Penelitian dilakukan pada periode tahapan Pilkada Jawa Timur 2024 dengan fokus pada interaksi publik yang berkaitan dengan isu transparansi dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai dinamika komunikasi politik digital pada Pilkada Jawa Timur 2024.

Khalayak sasaran dalam penelitian ini adalah pengguna media sosial yang terlibat dalam percakapan mengenai Pilkada Jawa Timur 2024. Pemilihan responden tidak dilakukan berdasarkan individu tertentu, melainkan menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap akun dan interaksi digital yang memenuhi kriteria penelitian. Kriteria tersebut meliputi akun yang memuat kata kunci terkait transparansi pemilu, partisipasi publik, pengawasan pemilu, KPU Jawa Timur, Bawaslu, serta tagar yang relevan dengan Pilkada Jawa Timur 2024. Unit analisis penelitian berupa akun pengguna, unggahan, komentar, balasan, *mention*, dan *retweet* yang menunjukkan adanya hubungan komunikasi antaraktor. Dengan teknik tersebut, data yang diperoleh lebih terfokus pada percakapan yang memiliki relevansi langsung dengan tujuan penelitian.

Bahan utama penelitian berupa data interaksi publik dari platform X dan Facebook yang diperoleh melalui penelusuran kata kunci dan tagar tertentu. Alat yang digunakan meliputi komputer atau laptop, perangkat lunak Microsoft Excel untuk pengelolaan data awal, dan perangkat lunak Gephi untuk visualisasi serta analisis jaringan sosial. Desain alat analisis dibangun dalam bentuk matriks hubungan antaraktor yang memuat sumber interaksi dan tujuan interaksi sehingga dapat menghasilkan representasi jaringan secara visual. Kinerja perangkat lunak Gephi

memungkinkan peneliti menghitung ukuran jaringan seperti jumlah *node*, jumlah *edge*, densitas jaringan, *degree centrality*, *betweenness centrality*, dan *modularity* secara lebih akurat (Bastian et al., 2009). Produktivitas alat tersebut ditunjukkan melalui kemampuannya memetakan aktor dominan, aktor penghubung, dan kelompok percakapan yang terbentuk dalam isu transparansi dan partisipasi publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi digital terhadap percakapan publik di media sosial selama tahapan Pilkada Jawa Timur 2024. Peneliti mengumpulkan data unggahan yang memuat kata kunci dan tagar yang telah ditentukan, kemudian mendokumentasikan interaksi berupa komentar, balasan, *mention*, dan *retweet* yang menunjukkan hubungan komunikasi antaraktor. Data yang terkumpul selanjutnya diseleksi untuk menghilangkan duplikasi, unggahan yang tidak relevan, serta akun otomatis yang tidak merepresentasikan percakapan publik secara wajar. Selain observasi digital, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap informasi resmi dari KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, dan sumber pemberitaan yang berkaitan dengan transparansi dan partisipasi publik dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap agar data yang diperoleh memiliki relevansi dan konsistensi dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembersihan dan pengkodean data untuk membentuk matriks hubungan antaraktor berdasarkan pola interaksi yang terjadi. Tahap kedua adalah visualisasi jaringan menggunakan Gephi untuk mengidentifikasi struktur jaringan, aktor sentral, dan pembentukan klaster percakapan. Tahap ketiga adalah penghitungan indikator *degree centrality* untuk mengetahui aktor yang memiliki hubungan paling banyak, *betweenness centrality* untuk mengetahui aktor yang berperan sebagai penghubung antaraktor atau antarklaster, serta *modularity* untuk mengidentifikasi komunitas atau kelompok wacana yang terbentuk dalam jaringan. Tahap terakhir adalah interpretasi hasil analisis jaringan secara deskriptif dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori masyarakat jaringan, tata kelola digital, dan partisipasi politik guna menjelaskan dinamika transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis jaringan sosial dilakukan terhadap percakapan publik di platform X dan Facebook yang memuat isu transparansi dan partisipasi publik selama tahapan Pilkada Jawa Timur 2024. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa percakapan digital tidak tersebar secara acak, tetapi membentuk pola hubungan yang saling terhubung antaraktor. Struktur jaringan memperlihatkan adanya aktor yang berperan sebagai pusat distribusi informasi, penghubung antar komunitas, dan penggerak diskusi publik. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial menjadi ruang penting dalam pembentukan wacana mengenai transparansi penyelenggaraan pemilu dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal. Ringkasan karakteristik jaringan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik jaringan sosial isu transparansi dan partisipasi publik

Parameter	Hasil Analisis
Jumlah node	1.248 akun
Jumlah edge	3.562 hubungan interaksi
Densitas jaringan	0,0046
Jumlah klaster utama	4 klaster

Aktor dengan degree centrality tertinggi	Akun media lokal
Aktor dengan betweenness centrality tertinggi	KPU Jawa Timur

Berdasarkan Tabel 1, jaringan memiliki densitas yang relatif rendah sehingga menunjukkan bahwa tidak semua akun saling berinteraksi secara langsung. Namun, jumlah hubungan interaksi yang cukup besar memperlihatkan adanya intensitas pertukaran informasi yang tinggi dalam isu transparansi dan partisipasi publik. Analisis *degree centrality* menunjukkan bahwa akun media lokal memiliki jumlah hubungan paling banyak dibandingkan aktor lainnya. Sementara itu, KPU Jawa Timur memiliki nilai *betweenness centrality* tertinggi sehingga berperan sebagai penghubung antar kelompok percakapan yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktor institusional dan media memiliki posisi strategis dalam distribusi informasi politik digital selama Pilkada Jawa Timur 2024.

Visualisasi jaringan menunjukkan bahwa percakapan publik membentuk empat klaster utama yang memiliki karakteristik wacana yang berbeda. Klaster pertama didominasi oleh isu transparansi penyelenggaraan pemilu dan akses informasi publik. Klaster kedua berfokus pada partisipasi pemilih, pendidikan politik, dan ajakan menggunakan hak pilih. Klaster ketiga berisi kritik terhadap penyelenggara pemilu dan pengawasan tahapan Pilkada, sedangkan klaster keempat berkaitan dengan dukungan terhadap kandidat tertentu dan dinamika kampanye digital. Pola tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai arena kontestasi wacana politik yang melibatkan berbagai kepentingan.

Analisis aktor sentral menunjukkan bahwa akun media lokal, KPU Jawa Timur, dan beberapa akun influencer politik memiliki posisi dominan dalam jaringan percakapan. Akun media lokal berperan dalam menyebarkan berita dan memperluas jangkauan informasi kepada pengguna lain. KPU Jawa Timur berfungsi sebagai sumber informasi resmi yang menghubungkan berbagai kelompok diskusi sehingga mampu menjembatani percakapan antar komunitas. Influencer politik memiliki pengaruh dalam membentuk opini dan meningkatkan intensitas interaksi melalui komentar, *mention*, dan *retweet*. Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi pengaruh dalam jaringan digital tidak hanya ditentukan oleh institusi formal, tetapi juga oleh aktor nonformal yang memiliki kapasitas mobilisasi perhatian publik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur jaringan sosial dalam isu transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024 memiliki pola yang terpusat pada aktor tertentu. Dominasi akun media lokal dan KPU Jawa Timur menunjukkan bahwa distribusi informasi politik digital masih sangat berkaitan dengan aktor yang memiliki otoritas informasi dan kapasitas komunikasi yang besar. Temuan ini sejalan dengan konsep *network society* yang menjelaskan bahwa kekuasaan dalam era digital bergantung pada kemampuan mengendalikan arus informasi dalam jaringan komunikasi (Castells, 2013). Dalam konteks Pilkada Jawa Timur 2024, aktor yang mampu menghubungkan banyak pengguna memiliki peluang lebih besar untuk memengaruhi pembentukan persepsi publik mengenai transparansi pemilu dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, struktur jaringan yang terpusat menunjukkan bahwa media sosial belum sepenuhnya menjadi ruang deliberasi horizontal antarwarga.

Keberadaan empat klaster utama menunjukkan bahwa ruang digital membentuk segmentasi percakapan berdasarkan isu dan kepentingan tertentu (Faustyna & Younus, 2026). Klaster transparansi pemilu dan partisipasi pemilih memperlihatkan adanya perhatian masyarakat terhadap akses informasi dan keterlibatan dalam proses demokrasi (Dompak et al., 2026).

Sementara itu, klaster kritik terhadap penyelenggara menunjukkan bahwa media sosial juga berfungsi sebagai sarana pengawasan publik terhadap tahapan Pilkada (Afnira, 2023). Temuan ini mendukung pandangan bahwa platform digital dapat memperkuat akuntabilitas dan partisipasi politik apabila menyediakan ruang bagi warga untuk menyampaikan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu (Margetts & Dunleavy, 2013). Oleh karena itu, media sosial memiliki fungsi ganda sebagai kanal informasi sekaligus mekanisme kontrol sosial dalam demokrasi digital.

Peran KPU Jawa Timur sebagai aktor dengan *betweenness centrality* tertinggi memiliki implikasi penting bagi tata kelola komunikasi pemilu (Indranata & Al-Hamdi, 2024). Posisi tersebut menunjukkan bahwa akun resmi penyelenggara pemilu mampu menghubungkan berbagai kelompok percakapan yang sebelumnya terpisah sehingga dapat mengurangi fragmentasi informasi. Dalam perspektif *digital governance*, komunikasi institusional yang responsif dan mudah diakses merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020). Temuan ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pengelola komunikasi publik dalam ruang digital. Dengan demikian, penguatan strategi komunikasi digital resmi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan legitimasi penyelenggaraan Pilkada.

Keterlibatan influencer politik dalam jaringan percakapan menunjukkan bahwa aktor nonformal memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk opini publik dan meningkatkan intensitas interaksi digital (Vanosha et al., 2026). Influencer mampu memperluas jangkauan informasi melalui jaringan pengikut yang besar dan interaksi yang cepat di media sosial. Namun, keberadaan aktor semacam ini juga berpotensi mempercepat penyebaran informasi yang belum terverifikasi apabila tidak disertai mekanisme klarifikasi yang memadai. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa influencer politik memiliki peran penting dalam membentuk partisipasi politik digital, tetapi sekaligus dapat memperkuat polarisasi dan penyebaran misinformasi apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab (Adhawiyah, 2026; Bintang & Ginting, 2026). Oleh karena itu, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa partisipasi politik digital berlangsung secara kritis dan berbasis informasi yang valid.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki kontribusi penting dalam membentuk transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024, tetapi distribusi pengaruh dalam jaringan masih cenderung terpusat pada aktor institusional dan media. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi penyelenggara pemilu untuk mengembangkan strategi komunikasi digital yang lebih partisipatif, interaktif, dan inklusif sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga bagian dari proses pengawasan dan deliberasi publik. Dari sisi akademik, penelitian ini memperkuat penggunaan *Social Network Analysis* sebagai pendekatan yang efektif untuk memetakan dinamika komunikasi politik digital pada pemilihan kepala daerah. Pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan data lintas platform, analisis sentimen, dan pendekatan longitudinal untuk melihat perubahan struktur jaringan selama seluruh tahapan Pilkada. Dengan pendekatan tersebut, pemahaman mengenai demokrasi digital di tingkat lokal dapat dikembangkan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan sosial dalam isu transparansi dan partisipasi publik pada Pilkada Jawa Timur 2024 membentuk struktur komunikasi digital yang terpusat pada

aktor institusional, media lokal, dan influencer politik. Analisis *Social Network Analysis* memperlihatkan bahwa KPU Jawa Timur memiliki peran penting sebagai penghubung antarklaster percakapan, sedangkan media lokal menjadi aktor yang paling dominan dalam distribusi informasi. Percakapan publik di media sosial membentuk empat klaster utama, yaitu transparansi penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilih, kritik terhadap penyelenggara, dan dukungan terhadap kandidat tertentu. Temuan tersebut menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai arena penting dalam penyebaran informasi, pengawasan publik, dan pembentukan opini politik selama tahapan Pilkada Jawa Timur 2024.

Penyelenggara pemilu, khususnya KPU Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur, disarankan untuk memperkuat strategi komunikasi digital yang lebih interaktif, responsif, dan berbasis partisipasi publik agar distribusi informasi tidak hanya terpusat pada aktor tertentu. Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan program literasi digital politik untuk membantu masyarakat mengenali informasi yang valid, memahami risiko misinformasi, dan berpartisipasi secara kritis dalam ruang digital. Pengelolaan akun resmi penyelenggara pemilu juga perlu dioptimalkan melalui penyediaan informasi yang lebih cepat, terbuka, dan mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan media lokal dan komunitas digital perlu dikembangkan untuk memperluas jangkauan edukasi mengenai transparansi dan partisipasi publik dalam pemilu. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data lintas platform, analisis sentimen, dan pendekatan longitudinal agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika jaringan sosial dan perubahan pola komunikasi politik selama seluruh tahapan Pilkada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya yang telah memberikan dukungan moril dan materil melalui Skema Pendanaan Internal FISIP UB sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, serta seluruh pihak yang telah memberikan informasi dan akses data yang diperlukan dalam penelitian ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada seluruh anggota tim peneliti dan mahasiswa yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Semoga dukungan dan kerja sama yang telah diberikan menjadi kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan kajian demokrasi digital, transparansi pemilu, dan partisipasi publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adhawiyah, S. R. (2026). Peran Influencer dan Blogger dalam Pembentukan Opini Publik di Media Sosial. *Humanism: Diversity, Culture, and Religious Moderation*, *1*(1), 45–56.

Afnira, E. (2023). Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Publikasi Pengawasan Pemilu 2024: Kasus Bawaslu Kota Tanjungpinang. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, *3*(1).

Aka, K. G. (2025). Actor-network theory-based applications in sustainability: A systematic literature review. *Cleaner Production Letters*, *8*, 100084.

Antyaputri, Z., Lalisang, N. A. C., & Nusantara, G. (2025). Analisis Jaringan Sosial Dan Aktor Pada Kolom Komentar Video "Ganjar Pranowo Bicara Gagasan" Di Akun Youtube Najwa Shihab. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 241–251.

Ayunda, N. D., Zusrieka, M., Pramesyanti, C. Z., Ramzy Sarman, M. K. M., & Ridwan, R. (2025). Partisipasi Politik Masyarakat Kota Surabaya dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024: Studi

Tentang Rendahnya Tingkat Partisipasi dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, *5*(1), 10.

Bastian, M., Heymann, S., & Jacomy, M. (2009). Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks. *Icwsm*, *8*(2009), 361–362.

Bintang, I., & Ginting, R. (2026). Digitalisasi dan Partisipasi Politik: Analisis Peran Influencer Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, *8*, 33–41. https://doi.org/10.31289/jipikom.v8i1.5803

Castells, M. (2013). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. John Wiley & Sons.

Dompak, T., Firiansyah, I., & Ahdarrijal, Y. (2026). Transformasi pemilu Indonesia menuju digital democracy: Suatu kajian literatur. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, *8*(2), 229–246.

Fahruji, D., & Fahrudin, A. (2023). Pemanfaatan media sosial dalam kampanye politik menjelang Pemilu 2024: Studi kasus tentang akun media sosial partai politik dan politisi. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, *6*(2), 118–132.

Faustyna, F., & Younus, M. (2026). The social network analysis (SNA) using NodeXL for sports tourism promotion: a case study of Aceh and North Sumatra. *Humanities and Social Sciences Communications*, *13*(1), 846.

Hamsi, A., Zainuddin, Z., & Arief, A. (2025). Pengaruh Media Sosial Dalam Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantaeng. *LEGAL DIALOGICA*, *1*(1).

Hasanah, R., Sopiani, S., & Asmara, P. (2026). Pemilu Di Era Digital: Antara Harapan, Transparansi Dan Ancaman Disinformasi. *Journal of Social and Education*, *2*(2), 228–233.

Indranata, F., & Al-Hamdi, R. (2024). *BuzzeRp vs Kadrun: Pengaruh Medsos terhadap Pembentukan Polarisasi Netizen Jelang Pilpres 2024*.

Isa, D., & Himelboim, I. (2018). A social networks approach to online social movement: Social mediators and mediated content in# freeajstaff twitter network. *Social Media+ Society*, *4*(1), 2056305118760807.

Kapoor, K. K., Tamilmani, K., Rana, N. P., Patil, P., Dwivedi, Y. K., & Nerur, S. (2018). Advances in social media research: Past, present and future. *Information Systems Frontiers*, *20*(3), 531–558.

Katili, A. Y., Katili, A. A. Z., & Pariono, A. (2025). Partisipasi politik generasi muda di era digital: Antara kesadaran kritis dan aktivisme daring. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Ilmu Sosial Dan Politik (J-EMSPOL)*, *2*(4), 198–212.

Khamdan, M., Fata, A. K., Macpal, S., & Kamaruzzaman, K. (2025). Social media and political mobilization in general elections in Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *21*(1), 211–238.

Khatimah, K., Selvia, V., Sugiyarti, A., Maulana, M. G., & Putra, M. L. S. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Vox Populi*, *7*(2), 128–143.

Lupac, P. (2018). Manuel Castells: Towards the Digital Divide of the Information Age. In P. Lupač (Ed.), *Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society*. Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-78756-547-020181007

Madina, N. R. (2025). Peran Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Administrasi Publik. *Pasca: Jurnal Ilmu Administrasi, Manajemen Sdm, Ilmu Sosial (P-Jiams)*, *2*(1), 15–22.

Margetts, H., & Dunleavy, P. (2013). The second wave of digital era governance. *A Quasi*.

Nasir, F. (2026). Grup Facebook Bondowoso Bersatu sebagai Ruang Publik Digital: Transformasi Komunikasi Warga dalam Mengawal Kebijakan Infrastruktur. *JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan)*, *9*(1), 91–112.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Digital Government Index Framework* (Number 03). https://www.oecd.org/gov/digital-government/

Prasetiyo, S. H., & Anggreni, L. S. (2026). Kampanye Digital Partai Politik dalam Menarik Generasi Milenial Antara Retorika dan Realita. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, *8*(2), 452–465.

Ramdani, M. J. P., Sihombing, A. P., Fitriani, F., Kusumah, S. H., Salwa, C. K., Wahyuningsih, W., Aulia, N., Noor, A. S., Nurfatonah, D. S., & Fitriyan, J. A. (2026). Transformasi Demokrasi Indonesia dalam Era Digital: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *3*(02).

Santoso, L., & Veliyanti, R. (2021). Pemanfaatan Social Network Analysis (SNA) Untuk Menganalisis Kolaborasi Panitia Pengawas Pilkada Tahun 2020 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Elkom: Jurnal Elektronika Dan Komputer*, *14*(2), 244–255.

Stieglitz, S., Hofeditz, L., Brünker, F., Ehnis, C., Mirbabaie, M., & Ross, B. (2022). Design principles for conversational agents to support Emergency Management Agencies. *International Journal of Information Management*, *63*, 102469.

Syah, I., Destyana, T., Zahra, A. A., Subki, A. I., & Saefudin, A. (2026). Partisipasi Politik Gen Z Dalam Pemilihan Umum Calon Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Tahun 2024. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *12*(1), 28–37.

Vanosha, A. P., Azizah, A., Febrian, F., Putrinova, G., Luthfiyyah, H., Fazila, H., Triadi, J., Harahap, L. H., Ardiansah, M. R., & Rafi, M. (2026). Peran lnfluencer Media Sosial Membentuk Opini Publik di Kalangan Mahasiswa. *Studi Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, *3*(1).